

ABSTRAK

Partisipasi merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas. Pemerintah Kabupaten Sleman konsisten mengelola aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis berbagai hal terkait dengan pelaksanaan partisipasi publik deliberatif berbasis website (2) Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan partisipasi publik deliberatif berbasis website di Dinas Perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2014.

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif dan kuantitatif. Data terutama diperoleh dari responden dengan teknik purposive sampling, didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder. Hasil penelitian, penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dalam perumusan kebijakan sudah berjalan dengan baik dan berada tingkat *Consultation* (konsultasi) serta ada tahapan *Inclusion* atau penyertaan. Faktor pendorong : adanya kelembagaan, kontinuitas, sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambat : data aduan tidak akurat, keterbatasan SDM dan human error.

Dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perumusan kebijakan daerah. Saran yang disampaikan supaya di masa mendatang pemerintah berkewajiban meningkatkan fasilitas dari tingkat konsultasi menjadi derajat kekuatan masyarakat (*Degree of Citizen Power*).

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, e-government, kebijakan deliberatif

ABSTRACT

Participation is one of the important elements that must be considered in the policy, this participation is a form of political participation of the people is very important in order to create good governance. Therefore, the implementation of public participation in policy formation should be regulated more clearly. Sleman District Government consistently manage the aspirations of the people with technology, information, and communication or so-called e-government. The purpose of this study was (1) Analyze matters relating to the implementation of deliberative public participation based websites (2) Analyzing the supporting factors and obstacles in the implementation of web-based deliberative public participation in Local Government Licensing Office Sleman 2014.

This research pressure was on the field research and the method used in this study was descriptive analysis both qualitative and quantitative. The data particularly obtained from respondent by purposive sampling technique, based on the questionnaire and interview as primary data, and completed with secondary data. Results of the study, the research obtained showed that the implementation of public participation in policy formulation Sleman has been running well and were level Consultation (consultation), and there are stages Inclusion or participation. The driving factors: the institutional, kontinyunitas, facilities and infrastructure memadahi. Inhibiting factors: the complaint of data is not accurate, human limitations and human error.

It can be concluded that the method of public participation in the formulation of regional policies, new is an obligation that must be implemented by the government, because of the demands of decentralization in local autonomy government wants a role alongside other stakeholders in the formulation of regional policies. Suggestions submitted so that in the future the government is obliged to increase the facilities of the level of public consultation into the degree of force (Degree of Citizen Power).

Keywords: community participation, e-government, deliberative policy